

**PERENCANAAN PENGEMBANGAN SEKOLAH
BERBASIS POTENSI DAN KEUNGGULAN DAERAH**

BINER AMBARITA

Abstrak

Potensi daerah di Provinsi Sumatera Utara adalah sangat besar dan beragam, ditinjau dari sumber daya alam dan juga sosial budaya. Keragaman tersebut hendaknya menjadi salah satu dasar penetapan jenis sekolah yang akan dibangun dan dikembangkan. Secara hipotetik dapat dikatakan bahwa, Akar permasalahan yang muncul di satu daerah tertentu cenderung berada di daerah itu sendiri, walaupun juga ada yang berasal dari daerah lain. Sejalan dengan hal itu, permasalahan daerah harus diselesaikan dengan menyelesaikan akar-akar permasalahannya. Penyelesaian akar permasalahan satu daerah, berada pada sejauh mana dan sedalam apa permasalahan sekolah dikaji dan diselesaikan di daerah tersebut. Akar permasalahan daerah adalah tidak dibangunnya sekolah berdasarkan potensi dan keunggulan daerah. Dengan kata lain, bahwa dengan pembangunan sekolah berbasis potensi dan keunggulan daerah maka sejumlah permasalahan yang mendalam di daerah tersebut dapat terselesaikan.

Kata Kunci: *Perencanaan, pengembangan sekolah, potensi daerah, keunggulan daerah*

A. PENDAHULUAN

Pengembangan dan pembangunan sekolah berbasis potensi dan keunggulan daerah telah menjadi program pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2005-2009 (Hia, 2005). Akan tetapi hingga tahun 2009, program itu belum tersentuh sama sekali, dan harusnya dirumuskan kembali pada Renstra Dinas Pendidikan 2010-2014. Potensi dan keunggulan daerah berada pada sumber daya manusia, material alam, dan budaya yang dimiliki daerah, yang pada dasarnya relatif berbeda satu dengan yang lainnya.

Dunia pendidikan di Indonesia dan di Sumatera Utara secara khusus sedang dihadapkan pada tiga persoalan yang cukup memprihatinkan (Irianto, 2008). Pertama, masih rendahnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Kedua, rendahnya mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan. Ketiga, lemahnya peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelola pendidikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pendidikan tersebut belum mampu menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki daya saing di era globalisasi. Hal ini menyebabkan Indonesia kebanjiran tenaga kerja berketerampilan tinggi (ahli) dengan bayaran tinggi dari Negara lain. Pada tahun 2003 terdapat 41.422 orang, tahun 2004 meningkat menjadi 57.159 orang. Korea Selatan menempati urutan pertama yakni 11.668 pekerja, kedua Jepang 9.442 pekerja, dan ketiga Taiwan 5.694 orang.

Pada sisi lain jumlah pengangguran usia 15 tahun ke atas di provinsi Sumatera Utara adalah 571.334 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 2.724.017 orang, dan tersebar di seluruh Kabupaten/kota (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2008). Jumlah pengangguran angkatan kerja tertinggi adalah di Medan dengan jumlah 123.670 orang, menyusul Deli Serdang sebanyak 88.267 orang, Langkat sebanyak 49.885 orang, Labuhan Batu 42.048 Orang, Simalungun sebanyak 37.634 Orang, Tapsel sebanyak 27.066 orang, Serge sebanyak 24.748 orang, Asahan sebanyak 23.025 orang, Madina sebanyak 15.571 orang, Binjai sebanyak 15.359 orang, dan paling sedikit adalah Pakpak Barat sebanyak 1.360 orang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemasalahan jumlah pengangguran adalah tersebar di seluruh Kabupaten/kota.

Sesungguhnya manusia adalah sumber daya yang harus dimanfaatkan dan ditangani dengan baik sehingga produktif. Variasi jenjang pendidikan dan keahlian serta keterampilan sumber daya manusia

di daerah yang sangat beragam, dapat dipandang sebagai asset yang potensial yang perlu pengelolaan yang tepat. Tinjauan seperti ini adalah sumber daya manusia sebagai material yang bermanfaat. Inti perencanaan berada pada strategi pemanfaatan material tersebut, sehingga penciptaan lowongan kerja sesuai dengan ketersediaan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia yang ada.

Perencanaan pemanfaatan sumber daya manusia, dengan pengembangan keterampilan dan keahlian dari sumber daya manusia yang telah tersedia, yang merupakan pengayaan dan penyesuaian dengan perencanaan lowongan kerja. Inti perencanaan adalah berada pada keterampilan dan keahlian tambahan yang belum dimiliki sumber daya manusia sehingga sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.

Perencanaan dengan memandang sumber daya manusia sebagai potensi semata yang harus diberi keterampilan-keterampilan, nilai-nilai, dan keahlian-keahlian. Inti perencanaan seperti ini terletak pada keseluruhan muatan yang harus dididik pada sumber daya manusia, sepenuhnya harus relevan dengan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang.

Jumlah pengangguran di setiap Kabupaten/kota, secara hipotetik dapat dikurangi dalam jumlah yang cukup besar bahkan hingga habis, jika ketiga model perencanaan pengembangan sumber daya manusia diawali pengembangan sekolah berbasis keunggulan daerah. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan daerah dapat dilaksanakan, jika komitmen pemerintah Kabupaten/kota adalah tinggi. Akan tetapi menurut Joko (2008), bahwa *political will* pemerintah, khususnya pemerintah daerah cukup rendah terhadap pembangunan pendidikan yang berkualitas.

B. POTENSI DAERAH

Ada sejumlah potensi daerah yang merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya pembangunan pendidikan, yaitu: (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) budaya dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat, (4) dan lain-lain.

Sumber daya manusia Provinsi Sumatera Utara dapat ditinjau dari berbagai hal, seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, agama, suku, dan kebudayaan. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 bahwa jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah berjumlah 12.834.371 orang, yang terdiri dari 6.381.870 orang laki-laki dan 6.452.501 orang perempuan. Hingga tahun 2007 jumlah penduduk miskin adalah 1.768.500 orang atau 13,90 %. Ditinjau dari aktivitas yang lalu, penduduk Sumatera Utara usia angkatan kerja sebanyak 5.654.131 orang, yang terdiri dari 5.082.797 orang berkerja dan sebanyak 571.334 orang menganggur. Penduduk yang bukan angkatan kerja adalah 2.724.017 orang. Dengan demikian sekitar 4.456.223 orang yang masih tidak diketahui sepenuhnya aktivitasnya. Persentase penduduk yang berkerja pada kelompok lapangan kerja, sebanyak 47,60% bekerja pada bidang pertanian (*agriculture*), 12,98 % pada bidang industri (*manufacture*), dan 39,42% pada bidang jasa (*service*).

Sumber daya alam ataupun sumber daya material yang dapat diolah disetiap daerah mempunyai jenis dan karakteristik yang relatif berbeda. Sumber daya alam yang dapat dijadikan objek pariwisata dan perikanan serta pertanian, seperti Danau Toba, sumber air panas bermineral, sungai, air terjun. Sumber daya alam material berupa batu kapur, batu padas, bau bara, dan lain-lain. Sumber daya material buatan, yang keberadaannya dapat menjadi permasalahan jika tidak dimanfaatkan seperti sampah. Sampah tidak hanya menjadi permasalahan di kota

Medan, akan tetapi telah menjadi permasalahan nasional, sementara sampah adalah sumber daya material yang bersifat ekonomis.

Sumber daya pada daerah perkebunan kelapa sawit seperti Simalungun, Labuhan Batu, dan yang lainnya adalah sumber daya material olahan yang sangat potensial, seperti lidi, cangkang, dan batang kelapa sawit, kulit buah cokelat, semua bagian pohon enau, semua bagian pohon kelapa, pohon nipah, pohon teh, dan lain-lain.

Dalam ensiklopedia-Wikipedia bahasa Indonesia dikatakan oleh J.J. Hoenigman, bahwa wujud budaya dapat dibedakan atas gagasan, aktivitas (tindakan), dan artefak. Gagasan pada dasarnya berada pada alam ide (ideal) dan otak manusia, akan tetapi dapat dituang dalam bentuk tulisan-tulisan sehingga perwujudannya dalam bentuk karangan dan buku hasil tulisan masyarakat. Aktivitas (tindakan) adalah wujud aktivitas yang berpola yang sering disebut sistem sosial, dan sistem nilai, yang pada dasarnya bentuknya konkrit dan dapat diamati. Hal ini termasuk dalam bentuk bahasa dan pola interaksi serta adat istiadat serta sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan.

Ketiga wujud budaya yang ada dimasyarakat adalah merupakan bentuk budaya yang saling berkaitan dan tak terpisahkan. Wujud idealism akan mempengaruhi wujud aktivitas dan artefak. Sebaliknya aktivitas dan artefak merupakan gambaran wujud idealisme, bahkan dapat pula mengembangkan wujud idealisme tersebut. Wujud idealisme jika dihadapkan material baru, maka perlu pengembangan dan teknologi baru tanpa meninggalkan hakikat idealisme tersebut. Dalam hal inilah letak fungsi perencanaan pengembangan sekolah.

C. PERENCANAAN PENGEMBANGAN SEKOLAH

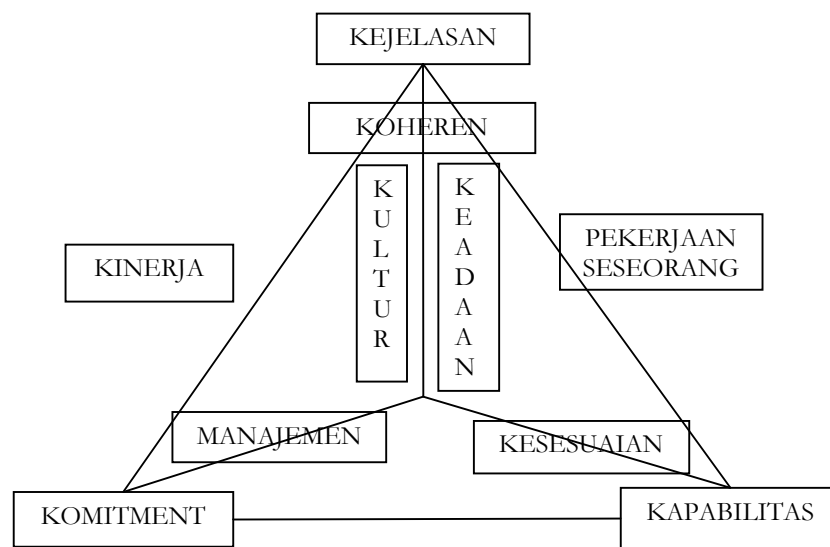
Pengembangan sekolah pada dasarnya mengandung kata kunci, yaitu perubahan, dalam mana mempunyai tiga pilar utama, yaitu: komitmen, kejelasan, dan kapabilitas (Boulter, 2003). Perubahan yang dimaksud adalah perubahan paradikma persekolahan yang selama ini telah berlangsung dan sesungguhnya membutuhkan berbagai hal agar perubahan itu dapat terjadi. Paradikma persekolahan yang berlangsung selama ini adalah Negara maju menjadi acuan nilai-nilai dalam persekolahan, sehingga sadar atau tidak sadar cenderung meninggalkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Akibatnya adalah terjadi konflik nilai yang berkepanjangan bagi diri subjek didik, yang berakibat pada saat titik kulminasi tertentu subjek didik merasa asing dalam masyarakatnya sendiri.

Subjek didik dibesarkan dalam budaya dan kultur masyarakatnya sendiri, akan tetapi persekolahan yang ada selama ini justru menciptakan kultur baru yang asing bagi subjek didik. Sekolah bermaknakan sebagai masyarakat dalam lingkup yang kecil dan sempit. Seharusnya sistem nilai dalam lingkup kecil ini adalah sama dengan sistem nilai dalam masyarakatnya. Hal inilah yang harus dikembalikan pada sistem persekolahan yang ada sekarang ini.

Karena perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat yang harus juga disikapi oleh persekolahan, maka perencanaan pengembangan persekolahan harus mengikuti perkembangan tersebut dalam bentuk perencanaan kurikulum yang tidak meninggalkan sistem nilai masyarakat. Bangunan persekolah tidak semata-mata memandang nilai praktis penggunaan ruang, akan tetapi haruslah mempertimbangkan bentuk bangunan masyarakat Sumatera Utara yang sarat dengan ornament dan artefak.

Menurut Sinaga (2009) sistem pembelajaran dalam persekolahan juga harus berbasis nilai budaya setempat. Lebih lanjut dikatakan bahwa pola interaksi sosial yang berlaku dalam masyarakat, seperti Dalihan Natolu akan membentuk soft skill yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan subjek didik. Hal ini berarti sistem perencanaan kurikulum dan aktivitas persekolahan harus tidak meninggalkan nilai budaya masyarakat dimana subjek didik berasal dan tinggal.

Perencanaan pengembangan sekolah dapat dikatakan sebagai perencanaan proses pembentukan kultur. Menurut Boulter (2003) bahwa proses pembentukan kultur dalam organisasi digambarkan seperti gambar 1. di bawah.



Gambar 1. Proses Pembentukan Kultur

Proses pembentukan kultur itu sendiri berada pada keseluruhan sistem persekolahan, yang menyangkut dalam sarana dan prasarana seperti bentuk gedung yang memiliki ornament dan model rumah adat setempat yang merupakan perwujudan budaya dalam bentuk artefak,

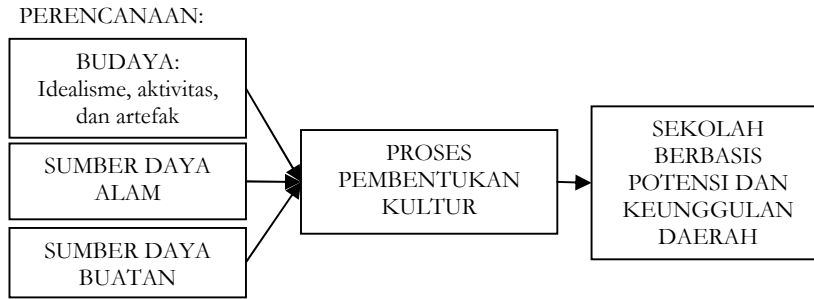
sistem interaksi siswa di dalam sekolah seperti interaksi pimpinan, guru, pegawai, dan siswa yang menggambarkan perwujudan budaya dalam aktivitas, kurikulum yang merupakan perwujudan budaya dalam bentuk idealisme.

Perencanaan pengembangan sekolah berdasarkan nilai budaya dalam wujud ide, aktivitas, dan artefak. Bentuk sekolah yang ada saat ini harus direnovasi menurut ketiga perwujudan budaya tersebut. Hal inilah yang dimaksud dengan perencanaan pengembangan sekolah. Bangunan yang selama ini tidak berornamen dan tidak berbentuk rumah adat, harus direnovasi atau ditambah sesuai dengan budaya. Buku-buku pelajaran harus ditulis dan dikemas dalam bentuk idealisme budaya. Penulisan buku ilmu dan teknologi dalam bentuk perwujudan dan idealisme (budaya) tentu masih membutuhkan pengkajian yang lebih dalam.

Materi kurikulum harus dipadu dengan potensi dan keunggulan daerah di mana sekolah berada. Dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sistem Manajemen Berbasis Sekolah maka keunggulan dan potensi daerah yang ada dapat menjadi muatan kurikulum, disamping muatan kurikulum nasional.

Dengan terciptanya pengembangan sekolah berbasis potensi dan keunggulan daerah tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa sekolah sebagai pusat nilai-nilai, pusat pelestarian dan pengembangan budaya, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya dan keunggulan daerah. Sekolah yang seperti ini dapat disebut sebagai Sekolah Berbasis Potensi dan Keunggulan Daerah (SBPKD).

Pada gambar 2 berikut, diperlihatkan blok diagram perencanaan pengembangan sekolah berbasis potensi dan keunggulan daerah.



Gambar 2. Perencanaan Pengembangan SBPKD

D. SEKOLAH BERBASIS POTENSI DAN KEUNGGULAN DAERAH (SBPKD) SERTA PERMASALAHANNYA

Pengembangan Sekolah berbasis potensi dan keunggulan daerah (SBPKD) dapat dimulai dari lembaga formal tingkat pra sekolah (TK), SD, SMP (SLTP), SMA (SMK), dan Perguruan Tinggi.

Dilihat dari sekolah adalah sebagai pusat nilai, pusat pelesatarian dan pengembangan budaya, serta sekolah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya, maka pengembangan sekolah harus meliputi seluruh tingkat atau jenjang sekolah tersebut. Namun demikian, melihat kondisi ekonomi dalam tulisan ini dikhususkan pada sekolah kejuruan, karena sekolah kejuruan dapat juga sebagai pusat pembaharuan keterampilan dan ilmu, sehingga masyarakat yang menganggur dapat diperbaharui keterampilan dan ilmunya sesuai dengan budaya dan keunggulan daerah dan relevan dengan kebutuhan.

Pemerintah Pusat menyediakan dana sebesar Rp. 3 Milyard untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sebesar 1 Milyard untuk pembangunan Sekolah Menengah Umum (SMU), dengan persyaratan pemerintah daerah harus menyediakan lahan tempat berdirinya sekolah. Akan tetapi daerah kurang memiliki komitmen untuk menyediakan lahan tempat pembangunan sekolah tersebut.

Pembangunan sekolah berbasis keunggulan daerah adalah jenis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mengarahkan kurikulumnya pada pengelolaan sumber daya material yang tersedia di daerah dimana sekolah tersebut dibangun. Perencanaan pembangunan sekolah kejuruan berbasis keunggulan daerah ini sekali gus akan mendukung program nasional yang mengarahkan pembangunan sekolah umum dan kejuruan, dengan perbandingan siswa SMA:SMK sebesar 33:67 hingga tahun 2014 (Depdiknas, 2009). Lebih lanjut Suyanto (2009) mengatakan bahwa siswa SMA harus berkurang pertahun rata-rata 1,78 % atau 120.000 siswa/tahun, sedangkan siswa SMK harus bertambah pertahun rata-rata 20,77% atau 515.000 siswa/tahun.

Pada saat ini perbandingan siswa SMA:SMK di Sumatera Utara masih 57,23:42,77, dan harus terjadi perubahan secara revolusioner terhadap minat masyarakat kepada sekolah kejuruan untuk mencapai target nasional tersebut (Nadeak, 2009). Di samping itu, harus diadakan pembaharuan jurusan (*retechnology*) pada SMK, dalam mana jurusan yang kurang diminati dan telah jenuh, diganti dengan jurusan yang baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah pusat menyediakan dana sebesar Rp. 1 Milyard untuk hal tersebut.

Pembangunan sekolah kejuruan berbasis keunggulan daerah, dapat dengan cara pembangaunan unit sekolah baru atau pembaharuan jurusan. Pelaksanaan pembangunan ini telah memiliki dasar hukum, yaitu kebijakan pemerintah. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah komitmen dan *political will* pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota.

Disamping hal tersebut, kesiapan Perguruan Tinggi penghasil guru juga harus mempersiapkan dan menyediakan guru yang mampu mendidik serta mengimplementasikan kurikulum kejuruan yang berbasis

keunggulan daerah tersebut. Banyak hal yang harus dikembangkan dalam kurikulum penghasil guru tersebut sehingga mampu menyambut kebijakan nasional, tentang pembangunan sekolah kejuruan berbasis keunggulan daerah tersebut.

Salah satu solusi adalah mengarahkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa secara wajib dalam pengembangan sekolah berbasis keunggulan daerah tersebut. Dengan cara lain adalah mengizinkan mahasiswa untuk meneliti dan mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan daerah. Objek material penelitian dapat berupa sistem manajemen pendidikan berbasis keunggulan daerah atau penelitian terhadap penciptaan produk yang materialnya berbasis keunggulan daerah. Dengan kata lain mahasiswa harus dibebaskan melakukan penelitian, dan tidak dibatasi oleh aturan mahasiswa program pendidikan hanya meneliti hal pendidikan saja.

Dengan kurikulum berbasis kompetensi dan sistem blok, sangat dimungkinkan untuk melakukan perubahan kurikulum dan kebijakan demi tercapainya program nasional. Khususnya bagi Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA sudah saatnya mengembangkan kurikulum yang mengarahkan ke pengelolaan sumber daya potensial dan keunggulan daerah, karena kedua Fakultas ini memungkinkan untuk melakukannya.

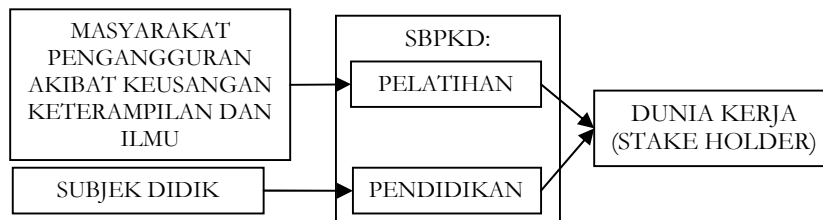
E. SEKOLAH BERBASIS POTENSI DAN KEUNGGULAN DAERAH (SBPKD) DAN SOLUSI PERMASALAHAN PENGANGGURAN

Paradikma pendidikan menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan hal ini, seharusnya jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dapat dikurangi hingga tersisa seminimal mungkin. Akan

tetapi akibat dari keusangan keterampilan dan pengetahuan, maka paradikma tersebut tidak selalu terpenuhi. Bahkan ironisnya, paradikma tersebut telah bergeser menjadi, bahwa pendidikan tidak menjamin lulusannya akan bekerja. Hal ini dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan relevansi pengetahuan yang ditransfer di persekolahan, bahkan membuat masyarakat kebingungan dan tidak memiliki pegangan dan acuan sebagai jaminan pekerjaan bagi subjek didik.

Sejalan dengan hal itu, secara hipotetik maka SBPKD akan mengembalikan pradikma pendidikan pada posisi yang seharusnya, bahwa pendidikan merupakan jaminan pekerjaan.

Peranan SBPKD dalam penanggulangan pengangguran, adalah sebagai fungsi pembaharuan (up to date) dan fungsi pemuatan kompetensi bagi subjek didik dan masyarakat secara umum. Pada gambar 3 diperlihatkan, fungsi SBPKD dalam menjembatani masyarakat dengan dunia kerja (stake holder).



Gambar 3. SBPKD sebagai solusi pengangguran

F. PENUTUP

Perencanaan pengembangan Sekolah Berbasis Potensi dan Keunggulan Daerah (SBPKD) adalah pengembangan sekolah pada semua jenjang pendidikan, namun secara khusus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu renovasi sistem persekolahan lama menjadi berbasis budaya, dan potensi daerah. Pengembangan sekolah berarti

melakukan perubahan sistem, yaitu proses pembentukan kultur daerah terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

SBPKD adalah solusi terhadap permasalahan pengangguran, pusat pelestarian dan pengembangan budaya, dan pusat pengembangan pengetahuan dan teknologi berbasis budaya. SBPKD adalah masyarakat persekolahan yang merupakan gambaran masyarakat dalam sistem nilai, budaya, potensi daerah secara lebih luas.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Boulter Nick, Murray Dalziel, Jackie Hill, (alih bahasa: Bern Hidayat). 2003. *Manusia dan Kompetensi. Panduan Praktis untuk Keunggulan Bersaing*. Jakarta: PT. Gramedia
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 2008. *Sumatera Utara dalam Angka*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Depdiknas. 2009. *Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas
- Hia Taroni. 2005. *Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- Irianto Mahfudz, Sidiq Syafiuddin. 2008. *Membangun Pendidikan Nasional". Teropong Pendidikan Kita*. Jakarta: Depdiknas.
- Joko Kristiyanto. 2008. "Political Will Pendidikan Menuju 2020". *Teropong Pendidikan Kita*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Nadeak Rosmawaty. 2009. "Pembangunan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara". *Bahan Rembuk Nasional tahun 2009*. Medan: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- Sinaga Bornok. 2009. "Model Pembelajaran Bermuatan Soft Skills dengan Pola Interaksi Sosial Dalihan Natolu". *Generasi Kampus, Volume 2, Nomor 1*. April 2009. Medan: UNIMED.
- Suyanto. 2009. "Paparan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2009. *Manajemen Dasar dan Menengah*". Paparan disampaikan dalam Rembuk Nasional Pendidikan tahun 2009. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- WWW:<http://Budaya-Wikipedia> bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas/9/15/2009.